

ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DILIHAT DALAM PERSPEKTIF PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 20

by BUSTANUL ULUM

Submission date: 13-May-2024 10:37PM (UTC-0500)

Submission ID: 2378861198

File name:

2_New_ANALISIS_PENERAPAN_GOOD_GOVERNANCE_DILIHAT_DALAM_PERSPEKTIF_PERMENDIKBUD_NOMOR_6_TAHUN_2021_1_.docx
(62.35K)

Word count: 5209

Character count: 34113

**“ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DILIHAT DALAM PERSPEKTIF
PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2021”**

Bustanul Ulum¹, Dini Ayu Pramitasari², Anisaul Hasanah³, Muhammad Halifatur Rahman⁴
Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Gresik

¹Email: bustanululum46@gmail.com;

²Email: da.pramitasari@gmail.com;

³Email: anisaulhasanah08@gmail.com;

⁴Email: halifhans@gmail.com;

ABSTRAK

“Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dan menganalisis kelayakan tata kelola dalam proses penerapan BOS di UPT SMP Negeri XYZ Gresik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendidikan dan Kehidupan Keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan penelitian kualitatif dilakukan pada latar alam secara menyeluruh dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian, analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi umum yang ada pada tempat penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan praktik baik penerapan BOS dan tata kelola di UPT SMP Negeri XYZ Gresik belum sepenuhnya sejalan dengan Permendikbud ke-6 Tahun 2021. Permasalahan teknis dalam pelaksanaan BOS dan tata kelola tersebut antara lain sebagai berikut: ketidakterediaan BOS, penyaluran BOS, pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS, dan rata-rata BOS baik. Implikasi teoritis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori keagenan dan sesuai dengan prinsip tata kelola dana BOS yang berlaku pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. Sebaliknya, penerapan praktis penelitian ini merupakan hasil perbandingan penerapan tolok ukur kualitas baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendidikan dan Kehidupan Keluarga. dengan Implementasi di UPT SMP Negeri XYZ Negara Yunani. Berdasarkan hasil observasi penelitian sampai dengan saat ini, belum ada penelitian yang dilakukan mengenai penerapan prinsip etos kerja yang baik di bidang usaha dan BOS dalam perspektif UU Pendidikan dan Keluarga Berencana”.

1
Kata kunci: Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, Good Governance, Dana BOS

Abstract

“The purpose of this study is to investigate and evaluate how UPT SMP Negeri XYZ Gresik has implemented good governance in the management of BOS funds in accordance with Minister of Education and Culture Regulation Number 6 of 2021. This study employs a qualitative methodology. When qualitative research is grounded in the natural world as a whole, uses people as study instruments, and analyses data by making generalisations about conditions that take place at the study site. The study's findings revealed that UPT SMP Negeri XYZ Gresik's implementation of good governance in the management of BOS funds did not fully comply with The Minister of Education and Culture's Number 6 of 2021. Technical issues with the implementation of BOS fund management included delays in the application of school budgets (ARKAS), activity plans, and BOS technical guidelines. that are inaccessible, hold-ups in the allocation of BOS funds, hold-ups in the

reporting of responsible use of BOS funds, but in terms of BOS budget performance following the average outcomes measurement Alright. Agency theory and The Minister of Education and Culture Number 6 of 2021's good governance of BOS funds are the theoretical implication used in this study. The practical consequences of this study are derived from a comparison of UPT SMP Negeri XYZ Gresik Country's implementation of good governance principles with those found in the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 6 of 2021. The application of good governance concepts to the management of BOS finances from the perspective of the Minister of Education and Culture has not been the subject of any research, according to research observations made thus far".

1

Keywords : The Minister of Education and Culture Number 6 of 2021, Good Governance, BOS Funds

PENDAHULUAN

"Diharapkan dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, pengelolaan dana BOS dapat tertata dengan baik. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak lepas dari Permendikbud nomor 6 tahun 2021, dimana peraturan tersebut merupakan petunjuk teknis yang mengatur pengelolaan dana BOS. Artinya, seluruh pelaksanaan pengelolaan dana BOS harus berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan".

"Tahir (2020:107) menjelaskan pengelolaan (tata kelola) yang baik atau sering di kenal sebagai *good governance* merupakan suatu konsepsi tentang

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Dengan pemerintahan yang baik maka sistem akan terintegrasi dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. *Good governance* yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung yaitu warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang transparan, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan (inklusif)".

"Penjelasan di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa tata kelola yang baik merupakan suatu sistem yang terpadu dalam suatu organisasi yang saling mempengaruhi dan mempunyai peranan penting dalam mengatur bagaimana kegiatan suatu organisasi dijalankan guna mencapai tujuan organisasi yang jelas, efisien, dan tepat sasaran memiliki semangat bersaing".

**Bustanul Ulum,
Dini ayu Pramitasari,
Anisaul Hasanah**

1
**ANALISIS PENERAPAN GOOD
GOVERNANCE DILIHAT DALAM
PERSPEKTIF PERMENDIKBUD NOMOR 6
TAHUN 2021**

“Dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2021 dijelaskan bahwa untuk mewujudkan *good governance* pengelolaan dana BOS setidaknya sekolah harus menerapkan prinsip *good governance* pengelolaan dana BOS yaitu prinsip fleksibilitas (leluasa), efektivitas (berpengaruh), efisiensi (bermanfaat), akuntabilitas (dapat tanggungjawab) dan transparansi (terbuka)”.

“Penafsiran Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 adalah bahwa dana BOS digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah, artinya sekolah mempunyai hak menentukan bagaimana dana BOS dikelola dan digunakan untuk suatu proyek agar dapat memenuhi kebutuhan sekolah secara tepat. Sekolah”.

“Blocher (2007:139) menjelaskan fleksibilitas atau fleksibel diartikan bahwa anggaran mampu menyesuaikan pendapatan dan beban dengan jumlah output aktual yang dicapai, artinya bahwa anggaran yang ada mampu dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga anggaran yang ada dapat difungsikan dengan baik dan benar”.

“Permendikbud No. 6 tahun 2021 menguraikan bahwa efektivitas dalam penggunaan dana BOS harus mencapai hasil yang signifikan, berdampak, dan bermanfaat. Hal ini harus dicapai dengan tetap memperhatikan efisiensi dalam pengelolaannya untuk memastikan tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal”.

“Ruslan (2021:12) mengartikan Efektifitas sebagai pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan

kata lain bahwa suatu organisasi diharapkan mampu menyesuaikan rencana kegiatan dengan anggaran atau biaya yang telah ditetapkan”.

“Permendikbud No. 6 tahun 2021 mendefinisikan efisiensi sebagai upaya menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan biaya minimal namun hasil maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah diharapkan dapat menggunakan anggaran dari program BOS yang disalurkan oleh kementerian secara efektif dan bijak”.

“Golany, B., & Roll, Y. (1989) menjelaskan bahwa *“efficiency chracterized by quantitative outputs”*. Artinya bahwa untuk mengukur dan mengetahui efisiensi seorang peneliti harus melakukan perhitungan atas proses dari *outputs* yang di hasilkan sehingga dari angka tersebut akan memberikan kesimpulan terkait efisiensi”.

“Berdasarkan pernyataan para ahli, dapat disimpulkan bahwa efisiensi memiliki keterkaitan yang signifikan dengan kualitas dan kuantitas pelaksanaan aktivitas. Hal ini melibatkan penggunaan biaya yang cermat dan tepat, sehingga memungkinkan pencapaian tujuan organisasi secara efektif”.

“Dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2021, akuntabilitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara menyeluruh, berdasarkan pertimbangan yang logis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

“Saleh, dkk (2020:33) memaknai akuntabilitas sebagai sebuah instrumen

**Bustanul Ulum,
Dini ayu Pramitasari,
Anisaul Hasanah**

*ANALISIS PENERAPAN GOOD
GOVERNANCE DILIHAT DALAM
PERSPEKTIF PERMENDIKBUD NOMOR 6
TAHUN 2021*

pengawasan dan tindakan responsibilitas yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sebagai wujud pemenuhan harapan masyarakat, Apa yang dimulai dari sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan umum, secara bertahap menjadi tujuan itu sendiri”.

“Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab atas akuntabilitas bersifat inheren dan mengikat setiap individu. Ini berarti bahwa meskipun suatu kegiatan telah selesai, tanggung jawab untuk melaporkan dan melakukan pemantauan terhadap kegiatan tersebut tetap berlangsung. Dengan kata lain, penyelesaian kegiatan tidak secara otomatis mengakhiri tanggung jawab akuntabilitas atau pertanggungjawabannya”.

“Permendikbud nomor 6 tahun 2021 menjelaskan transparansi diartikan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah”.

“Definisi tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus dilakukan secara transparan, yang berarti masyarakat perlu mendapatkan akses informasi tentang perencanaan, penggunaan, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana tersebut”.

“Tahir (2020:109) menjelaskan transparansi (Transparency) secara harfiah adalah jelas (obvious), dapat dilihat secara menyeluruh (able to be seen). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan”.

“Disamping itu dalam penelitian mengenai *good governance* tidak sempurna jika tidak ada teori yang mendukung terkait pelaksanaan *good governance*, oleh karenanya peneliti mengambil *agency theory* sebagai *grand theory* yang mendasari penelitian mengenai konsep *good governance* yang dilakukan penelitian”.

“Michel Johnson, dikutip oleh Daniri (2014:5), menguraikan bahwa Teori Agensi mengasumsikan bahwa manajemen tidak selalu bertindak sepenuhnya untuk kepentingan umum atau para pemegang saham. Dalam konteks penelitian ini, hal tersebut berarti bahwa pemangku kebijakan di sekolah mungkin berperilaku di luar aturan yang ditetapkan dalam pengelolaan sumber daya, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi pemangku kepentingan”.

“Teori Agensi, sebagaimana dijelaskan oleh Eisenhardt (1989a), berlandaskan pada beberapa asumsi mengenai sifat dasar manusia. Pertama, dianggap bahwa manusia secara inheren bertindak demi kepentingan pribadi atau 'self-interest'. Kedua, manusia memiliki 'bounded rationality', artinya kapasitas mereka untuk memproses informasi terbatas, sehingga sering berubah-ubah dalam pola pikir. Terakhir, manusia dianggap sebagai makhluk yang 'risk averse', yaitu cenderung menghindari risiko”.

“Pernyataan diatas memberikan asumsi bahwa dalam pengelolaan sumber daya yang dilaksanakan dalam suatu organisasi memungkinkan terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan kegiatan tersebut, oleh karenanya penting untuk dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam hal ini

**Bustanul Ulum,
Dini ayu Pramitasari,
Anisaul Hasanah**

pengelolaan anggaran BOS, sehingga teori keagenan diharapkan menjadi solusi untuk memecahkan masalah yang timbul dalam pengelolaan anggaran BOS”.

“Pentingnya penelitian mengenai penerapan dan pelaksanaan *good governance* dalam pengelolaan dana BOS tidak lain tujuannya adalah agar dalam pengelolaan anggaran BOS dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul dapat diatasi”.

“Fauziah, dkk (2021) Dalam temuan audit yang dilakukan oleh Fauziah dan tim dari Irjen Kemendikbud Ristek pada tahun 2021 terkait dengan transfer dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terungkap beberapa permasalahan. Pertama, Tim BOS tidak menyusun permintaan atau rencana penggunaan dana sebelum dana tersebut digunakan. Kedua, sekolah-sekolah belum melakukan publikasi laporan penerimaan dan penggunaan anggaran BOS kepada masyarakat secara terbuka”.

Dari latar belakang yang telah dibahas, kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Penelitian ini dilakukan di UPT SMP Negeri XYZ di Kabupaten Gresik.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

“Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertumpu pada konteks alamiah sebagai sebuah kesatuan utuh, memanfaatkan manusia sebagai alat

ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DILIHAT DALAM PERSPEKTIF PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2021

pengumpulan data utama, dan melakukan analisis data dengan cara menarik kesimpulan dari situasi umum. Ini berarti bahwa peneliti memiliki peran krusial dalam pengumpulan dan pengolahan informasi, menjadikan peneliti sebagai instrumen yang penting dalam penelitian”.

Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dijalankan di tingkat pendidikan dasar Sekolah Menengah Pertama (SMP), khususnya di UPT SMP Negeri XYZ yang terletak di Kabupaten Gresik. Sekolah ini mendapatkan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Oktober 2021 hingga Juni 2022.

Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini, sumber data yang digunakan terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian, yang meliputi laporan, bukti transaksi, dan dokumen fisik lain yang diperoleh dari lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui sumber-sumber lain, baik yang bersifat lisan maupun tulisan.

Metode Pengumpulan dan Analisis data

“Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara terstruktur

Bustanul Ulum,
Dini ayu Pramitasari,
Anisaul Hasanah

dan dokumentasi sedangkan analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan”.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Good Governance pengelolaan dana BOS

Penerapan Prinsip Fleksibilitas

Implementasi prinsip fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPT SMP Negeri XYZ Gresik masih belum memenuhi standar dan jauh dari ideal. Berdasarkan hasil penelitian serta data dan informasi yang diperoleh, teori dan prinsip mengenai pengelolaan dana BOS yang seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah belum sepenuhnya tercapai di lapangan. Kendala ini terjadi karena pengelolaan dana BOS telah diatur secara ketat dalam Permendikbud dan melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, Tim BOS menghadapi kesulitan dalam menyusun perencanaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena sekolah tidak memiliki keleluasaan dalam menentukan pengeluaran yang ingin diakomodir dalam perencanaan. Hal ini dikarenakan semua perencanaan diatur melalui sistem, yang berarti bahwa setiap rekening belanja dan item yang direncanakan harus sesuai dengan aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta petunjuk teknis dari Kemendikbud. Akibatnya, dalam merencanakan anggaran, sekolah secara tidak langsung dipaksa untuk menyesuaikan dengan apa yang ada dalam aplikasi RKAS.

Keterbatasan dalam lingkup

ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DILIHAT DALAM PERSPEKTIF PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2021

pelaksanaan perencanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seringkali menyebabkan ketidaksesuaian antara apa yang direncanakan dengan yang sebenarnya dilaksanakan. Hal ini terjadi karena ada kebutuhan mendesak dan penting di sekolah yang tidak dapat diakomodir dalam perencanaan. Akibatnya, sekolah terpaksa melanggar aturan pengelolaan dana BOS, yang pada akhirnya menghasilkan temuan audit mengenai ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi belanja.

Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

Keterlambatan dalam penerbitan Petunjuk Teknis (Juknis) dan masalah aksesibilitas Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) di awal tahun anggaran menyebabkan proses penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhambat. Akibatnya, pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), yang seharusnya telah selesai sebelum tahun anggaran dimulai, seringkali masih dalam proses penyusunan bahkan setelah tahun anggaran berjalan. Hal ini mengakibatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran BOS menjadi terhambat.

Kendala yang timbul akibat Petunjuk Teknis (Juknis) dan masalah dengan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) menyebabkan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami keterlambatan. Dana BOS yang seharusnya disalurkan pada awal tahun anggaran baru bisa tersalur pada akhir Triwulan I, mengakibatkan sekolah sering kali terpaksa berutang ke toko untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan

1
Bustanul Ulum,
Dini ayu Pramitasari,
Anisaul Hasanah

kerjasama dengan pihak ketiga untuk belanja kebutuhan sekolah.

"Deadline penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang mendesak karena keterlambatan juknis membuat perencanaan tidak maksimal dan pada akhirnya banyak

1
ANALISIS PENERAPAN GOOD
GOVERNANCE DILIHAT DALAM
PERSPEKTIF PERMENDIKBUD NOMOR 6
TAHUN 2021

nomor 22/PMK.02/2021 dengan perhitungan sebagai berikut :

1. menghitung capaian output program dana BOS, dihitung dengan rumus :

$$COP = \left(\prod_{i=1}^l \left(\prod_{j=1}^m \left(\prod_{k=1}^n \frac{RIOP_i}{TIOPI} \right) \right) \right) (\sqrt{n \cdot m \cdot l})$$

belanja yang sifatnya penting yang seharusnya dimasukkan dalam Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) akhirnya tidak terakomodir dengan baik karena perencanaan tidak maksimal”.

Meskipun pelaksanaan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih dianggap jauh dari sempurna, persepsi mengenai kinerja anggaran dana BOS mungkin berbeda. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti juga mengukur kinerja anggaran dana BOS dari aspek implementasinya. Dari hasil pengukuran tersebut, akan dilakukan perbandingan untuk menentukan apakah kinerja pelaksanaan pengelolaan anggaran dana BOS secara keseluruhan memang buruk, atau terdapat perbedaan signifikan.

Golany dan Roll (1989) mendefinisikan efisiensi sebagai sesuatu yang dicirikan oleh output kuantitatif, artinya efisiensi diukur berdasarkan angka atau kuantitas. Berdasarkan pemahaman ini, peneliti melakukan pengukuran kinerja dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan harapan dapat menghasilkan nilai yang menunjukkan kinerja anggaran dana BOS.

dalam pengukuran kinerja anggaran BOS peneliti mengadopsi formula dari PMK

Dari rumus diatas didapatkan hasil sebagai berikut :

$$COP = \left(\prod_{k=1}^8 \frac{8}{8} \right) = 1 \times \sqrt[8]{1} = 1 \times 100\% = 100\%$$

COP adalah ukuran dari output kegiatan yang dibiayai oleh dana BOS, yang menggambarkan seberapa efektif dana tersebut digunakan. RIOP adalah realisasi indikator output dari program BOS, sementara TIOP adalah target dari indikator output tersebut. Dalam konteks ini, 'l' merepresentasikan jumlah program pendanaan di sekolah, khususnya program BOS; 'm' adalah jumlah output dari program tersebut; dan 'n' adalah jumlah indikator output dari program dana BOS.

Berdasarkan penjelasan di atas, angka 8 (delapan) digunakan sebagai indikator output yang mengacu pada standar nasional pendidikan, dimana terdapat 8 (delapan) komponen utama. Variabel 'l', 'm', dan 'n' masing-masing bernilai 1 (satu), menunjukkan bahwa hanya ada satu program yang dinilai, yaitu program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kesimpulan dari COP, atau Capaian Output Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang mencapai 100% menunjukkan bahwa anggaran dana BOS memiliki pengaruh signifikan dan memberikan manfaat nyata dalam pelaksanaannya.

2. Capaian Rincian output (RO) program BOS, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$CRO = \left(\prod_{i=1}^m \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right)^{1/m} \times 100\%$$

Dari rumus diatas didapatkan hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned} a \quad CRO &= \left(\prod^8 \frac{237_i}{242_i} \right)^{1/8} \times 100\% = \\ &= (0,979)^{0,125} \times 100\% = \sqrt[8]{0,979} \\ CRO &= 0,99 \times 100\% = 99\% \end{aligned}$$

1
Bustanul Ulum,
Dini ayu Pramitasari,
Anisaul Hasanah

CRO adalah capaian rincian output (rincian belanja barang dan/atau jasa), RVRO adalah realisasi volume atau belanja yang mampu direalisasikan, TVRO adalah

“target volume atau target belanja yang ingin direalisasikan dan m adalah jumlah rincian output (RO), diketahui bahwa realisasi belanjanya sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) item, target belanjanya sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua item), n adalah jumlah rincian output atau komponen standar pendidikan”.

dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian rincian output (RO) program BOS sangat baik dimana rincian (belanja) dana BOS yang direncanakan mampu direalisasikan dengan prosentase 99% (sembilan puluh sembilan persen) artinya bahwa jenis barang dan/jasa yang ada pada RKAS mampu dibelanjakan semua dengan baik.

3. Penyerapan anggaran dana BOS, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

Dari rumus diatas didapatkan hasil sebagai berikut :

$$P = \frac{1.293.334.900}{1.328.840.000} \times 100\% = 97,33\%$$

1 P adalah Penyerapan anggaran, RA adalah Realisasi Anggaran, sedangkan AA adalah Alokasi Anggaran. Dalam konteks ini, penyerapan anggaran dana BOS mencapai **1** 97,33%, yang berarti hanya 2,67% dari alokasi anggaran yang tidak terserap. Hal ini menunjukkan hasil yang sangat baik karena sebagian besar anggaran telah digunakan dengan efisien dan efektif.

1
ANALISIS PENERAPAN GOOD
GOVERNANCE DILIHAT DALAM
PERSPEKTIF PERMENDIKBUD NOMOR 6

1 **TAHUN 2021**
 baik seperti yang dikategorikan dalam PMK No. 22/PMK.02/ 2021 pasal 38, hal tersebut menandakan bahwa anggaran dana BOS telah dialokasikan dengan benar.

4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan dana BOS dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\sum_{i=1}^n (RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n| \times 100\%)$$

$$= \frac{RPDK}{n} \times 100\%$$

1 Dari rumus diatas didapatkan hasil sebagai berikut :

$$K = \frac{100\%+100\%+99,95\%+79,26\%+26,08\%+89,90\%+50\%+50\%+50\%+89,69\%+60,06\%+50\%}{12} = 70,41\%$$

“Hasil perhitungan diatas didasarkan pada tabel (terlampir) pada bagian lampiran skripsi yang telah diolah peneliti dari ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)”.

“Dijelaskan bahwa K adalah konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, RAKn adalah realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan n, RPDKn adalah rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke-n dan n adalah jumlah bulan”

“Hasil perhitungan Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan dirasa cukup, artinya konsistensi penyerapan anggaran tidak jelek, alasan konsistensi penyerapan anggaran hanya mampu di angka 70,41% (tujuh puluh koma empat puluh satu persen) dikarenakan sekolah menyesuaikan penyaluran dana BOS dan menyesuaikan kebutuhan sekolah, jadi sekolah hanya membelanjakan dana BOS”

Bustanul Ulum,
Dini ayu Pramitasari,
Anisaul Hasanah

sesuai kebutuhan yang sudah direncanakan tiap bulan.

5. Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran dana BOS atas aspek implementasi dihitung dengan menggunakan rumus :

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP} \text{ atau } CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$$

Dari rumus diatas didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$NKI = (97,33\% \times 9,70\%) + (70,41\% \times 18,20\%) + (99\% \times 43,5\%) + (54,18\% \times 28,60\%)$$

$$NKI = 80,82\%$$

NKI adalah singkatan dari "Nilai Kinerja Anggaran" yang mengacu pada aspek implementasi. Dalam konteks ini, P adalah penyerapan anggaran, K adalah konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, COP adalah capaian output program, CRO adalah capaian rincian output, dan NE adalah nilai efisiensi satuan kerja. Selain itu, terdapat bobot untuk setiap komponen, yaitu Wp untuk bobot penyerapan anggaran, Wk untuk bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, Wcop untuk bobot capaian output program, Wcro untuk bobot capaian rincian output program, dan WE untuk bobot efisiensi.

"Perlu difahami bahwa bobot nilai Wp, Wk, Wcop, Wcro, dan WE telah disebutkan dalam PMK No. 22/PMK.02/2021 pasal 12 ayat (3), sedangkan nilai NE yang tertera dalam rumus telah dilakukan perhitungan sebelumnya yang tidak dicantumkan dalam perhitungan di skripsi ini, namun hal tersebut tidak menjadi soal, karena perhitungan yang lainnya telah dihitung dalam skripsi ini".

Dari hasil perhitungan diatas nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi

ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DILIHAT DALAM PERSPEKTIF PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2021

mencapai 80,82% (delapan puluh koma delapan puluh dua persen) yang dapat dikategorikan baik, artinya bahwa penerapan dan pelaksanaan kinerja anggaran sudah sesuai dengan perencanaan.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dalam penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas, terdapat perbedaan antara teknis pelaksanaan pengelolaan dana BOS dan kinerja anggaran dana BOS. Meskipun teknis pelaksanaan pengelolaan dana BOS dianggap masih buruk, namun dari sisi kinerja anggaran, pengaruhnya sangat besar dan dapat dimaksimalkan dengan baik. Artinya, meskipun ada kelemahan dalam pelaksanaan teknis, tetapi pengelolaan anggaran dana BOS masih mampu memberikan dampak yang signifikan dan dapat dioptimalkan dengan baik.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip penting yang menjadi instrumen dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS. Melalui laporan pertanggungjawaban tersebut, para stakeholder atau pemangku kepentingan, terutama masyarakat atau wali murid, secara tidak langsung dapat menilai kinerja sekolah dalam mengelola dana BOS yang disalurkan oleh Kementerian.

"Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS akan membuat masyarakat mampu memberikan penilaian atau membandingkan hasil yang telah dilaksanakan dari pengelolaan dana BOS dengan laporan pertanggungjawaban yang di susun oleh sekolah sebagai bukti fisik bahwa sekolah telah membelanjakan dan menggunakan dana BOS dengan bijak atau tidak untuk sekolah".

**Bustanul Ulum,
Dini ayu Pramitasari,
Anisaul Hasanah**

"Sumber Daya Manusia (SDM) sekolah dalam hal ini Tim BOS sekolah juga memiliki peran penting dalam pengelolaan

1
**ANALISIS PENERAPAN GOOD
GOVERNANCE DILIHAT DALAM
PERSPEKTIF PERMENDIKBUD NOMOR 6
TAHUN 2021**

**Bustanul Ulum,
Dini ayu Pramitasari,
Anisaul Hasanah**

dana BOS, perlu difahami bahwa keterlambatan penyaluran dana BOS memiliki keterkaitan dengan bagaimana sekolah melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban atas dana BOS yang di salurkan dalam tiap-tiap tahapannya”.

Permasalahan mendasar yang fatal yang menjadi temuan oleh tim audit dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah, khususnya di UPT SMP Negeri XYZ Gresik, adalah bahwa sekolah tidak menyusun laporan pertanggungjawaban yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Ini termasuk absennya berita acara dan laporan tertulis tentang pelaksanaan rapat koordinasi dan sosialisasi perencanaan penggunaan dana BOS. Akibatnya, secara tidak langsung, sekolah telah melanggar peraturan yang tercantum dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2021 mengenai pembentukan Tim BOS untuk penyusunan RKAS.

Penerapan Prinsip Transparansi

Ketidakpartisipasian pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana BOS menyebabkan prinsip keterbukaan atau transparansi belum sepenuhnya terwujud, penting untuk dicatat bahwa dalam prinsip pengelolaan dana BOS, sekolah harus mempertimbangkan aspirasi pemangku kepentingan seperti wali murid atau komite. Tanpa data, informasi yang valid, atau dokumentasi mengenai koordinasi pengelolaan dana BOS, dapat dipastikan bahwa perencanaan pengelolaan dana BOS sekolah telah melanggar ketentuan

ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DILIHAT DALAM PERSPEKTIF PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2021

peraturan yang terdapat dalam Permendikbud.

Permendikbud nomor 6 tahun 2021 memberikan petunjuk mengenai pengelolaan dana BOS dengan menekankan pentingnya melibatkan semua elemen, baik dari pelaksana kebijakan (internal sekolah) maupun pemangku kepentingan (masyarakat atau wali murid). Dalam pelaksanaannya, hal ini diharapkan mampu menghasilkan saran dan gagasan guna optimalisasi penggunaan dana BOS yang dialokasikan.

“Menjelaskan prinsip transparansi atau Keterbukaan mengenai pelaksanaan pengelolaan dana BOS tidak hanya dibuktikan dengan pelaksanaan kegiatan fisik disekolah, namun lebih dari itu laporan pelaksanaan pengelolaan dana BOS dalam menunjang keterbukaan pelaksanaan pengelolaan dana BOS merupakan bagian terpenting yang harus di publikasikan”.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan dana BOS adalah instrumen penting yang digunakan untuk memvalidasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana BOS di UPT SMP Negeri XYZ Gresik. Dengan LPJ ini, kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam perencanaan, penggunaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS dapat diidentifikasi untuk dilakukan tindak lanjut guna perbaikan di masa mendatang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Penerapan Good

Governance dilihat dalam perspektif Permendikbud nomor 6 tahun 2021" maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip Fleksibilitas
 - a. Sekolah tidak mampu menyesuaikan kebutuhan sekolah dalam pengelolaan dana BOS dikarenakan Penyusunan RKAS didasarkan pada juknis dan RKAS sehingga sekolah secara tidak langsung harus menyesuaikan apa yang di atur di juknis maupun ARKAS.
2. Penerapan prinsip Efektivitas dan Efisiensi
 - a. "Juknis BOS belum disahkan sehingga sekolah tidak bisa merencanakan karena dasar perencanaannya yaitu juknis belum terbit".
 - b. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) belum bisa diakses dan masih dalam maintenance
 - c. Penyaluran dana BOS terlambat
 - d. "Sekolah sering melakukan bon barang atau kebutuhan sekolah kepada toko maupun pihak ke tiga (penyedia) karena dana BOS yang terlambat disalurkan"

Namun jika dilihat efisiensi dan efektivitas kinerja anggaran dan BOS berdasarkan PMK No. 22/PMK.02/2021 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. "Capaian keluaran program dana BOS didapatkan nilai prosentase 100% (seratus persen)".
- b. "Capaian rincian keluaran (RO) program BOS didapatkan nilai prosentase 99% (sembilan puluh sembilan persen)".
- c. "Penyerapan anggaran dana BOS didapatkan nilai prosentase 97,33%"

ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DILIHAT DALAM PERSPEKTIF PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2021

(sembilan puluh tujuh koma tiga puluh tiga persen).

- d. "Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dana BOS didapatkan nilai prosentase 70,41% (tujuh puluh koma empat puluh satu persen)".
 - e. "Penilaian evaluasi kinerja anggaran dana BOS atas aspek implementasi didapatkan nilai prosentase 80,82% (delapan puluh koma delapan puluh dua persen)".

"Dari hasil pengukuran diatas dapat di simpulkan bahwa rata-rata hasil pelaksanaan pengukuran kinerja anggaran dana BOS masuk dalam kategori Baik".
3. Penerapan prinsip Akuntabilitas
 - a. "Penggunaan dana BOS tidak sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)"
 - b. "Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS seringkali terlambat"
 - c. Sekolah belum menyusun berita acara tertulis mengenai pelaksanaan rapat dan koordinasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
 4. Penerapan prinsip Transparansi
 - a. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum dapat mengakomodir semua keputusan dari pemangku kepentingan, seperti wali murid atau komite sekolah, karena tidak terdapat dokumentasi yang memadai mengenai pelaksanaan kegiatannya.
 - b. Informasi tentang penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai kurang terbuka karena hanya dipublikasikan dalam lingkup sekolah, sehingga akses bagi

1
Bustanul Ulum,
Dini ayu Pramitasari,
Anisaul Hasanah

masyarakat umum menjadi
terbatas.

1
ANALISIS PENERAPAN GOOD
GOVERNANCE DILIHAT DALAM
PERSPEKTIF PERMENDIKBUD NOMOR 6
TAHUN 2021

**Bustanul Ulum,
Dini ayu Pramitasari,
Anisaul Hasanah**

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka dari kesimpulan tersebut saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pihak Internal

a. Sekolah

“Penelitian ini dimaksudkan mampu memberikan informasi tentang kelemahan, kekurangan dan solusi untuk sekolah dalam mengelola dana BOS sehingga dari informasi tersebut ada perbaikan untuk kedepannya”.

b. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan informasi tentang pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah-sekolah. Hal ini diharapkan akan memungkinkan dinas pendidikan untuk mengevaluasi dan mengatasi masalah serta kekurangan yang ada, sebagai upaya respons dan perbaikan dalam pengelolaan dana BOS.

2. Pihak Eksternal

a. Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat umum, terutama para wali murid, tentang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan oleh kementerian ke sekolah-sekolah. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami dan terlibat dalam mengawasi penggunaan dana tersebut, sehingga fungsi dan manfaat dana BOS dapat dimaksimalkan dan tepat sasaran.

3. Penelitian Selanjutnya

a. “Penelitian selanjutnya diharapkan mengambil metode atau jenis

ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DILIHAT DALAM PERSPEKTIF PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2021

penelitian kuantitatif sehingga jangkauan objek penelitian lebih luas. data dan informasi yang di hasilkan lebih akurat”.

b. “Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan software stata sehingga analisa data mampu disajikan lebih lengkap”.

References

Anisa, S. S. H. D. (2019). Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah (Y. S. Hayati (ed.); ke-1). PT Rajagrafindo Persada.

Daniri, M. A. (2014). Lead By GCG (D. Edward (ed.); Pertama). Gagasan Bisnis.

Novie Astuti Setianingsih Asmoro, W. K. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi untuk Mewujudkan Good Governance (T. N. Karya (ed.); Pertama). CV. Nata Karya.

Sumartono, Tjahjanulin Domai, Choirul Saleh, S. S. (2020). Akuntabilitas Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah (N. F. Atif (ed.); Kesatu). PT Refika Aditama.

Tahir, A. (2011). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (F. Zuhendri (ed.); Ketiga). ALFABETA, CV.

Wahyudin, U. R. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektifitas, Transparansi,

**Bustanul Ulum,
Dini ayu Pramitasari,
Anisaul Hasanah**

Akuntabilitas) (H. Permana (ed.);
Pertama). CV Budi Utama.

Wibowo, A. (2013). Akuntabilitas
Pendidikan Upaya Meningkatkan
Mutu dan Citra Sekolah (J. Yuniarto
(ed.); Pertama). Pustaka Pelajar.

Agus Riyanto, L., Pindahanto Widodo, R.,
Kunci, K., Dana Desa, A., &
Governance, G. (2021). Akuntabilitas
Dan Transparansi Pemerintah Desa
Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam
Mewujudkan *Good Governance*
(Studi Kasus di Kantor Pemerintah
Desa Bendoroto, Kecamatan
Munjungan) (Vol. 15, Issue 2).

Amaliah Nur Afifah, A., Rochmiyatun, S.,
Islam Negeri Raden Fatah
Palembang, U., Zainal Abidin Fikri
KM, J. K., & Selatan, S. (2021).
Analisis Prinsip *Good Corporate
Governance* Dalam Pengelolaan
Wakaf Produktif Di Yayasan Sekolah
Islam Terpadu (Sit) Al-Furqon. In *A
Research Journal On Zakat And Waqf*
(Vol. 01).

Andi Nimah Sulfiani. (2021). *Good
Governance* Penerapan Prinsip-
Prinsip *Good Governance* dalam
Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota
Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*,
17(1), 95–116.

Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R.
(2021). Tranparansi dan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa dalam Pencapaian *Good
Governance*: Studi Kasus Desa

*ANALISIS PENERAPAN GOOD
GOVERNANCE DILIHAT DALAM
PERSPEKTIF PERMENDIKBUD NOMOR 6
TAHUN 2021*

Cepogo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal
Maksipreneur: Manajemen,
Koperasi, Dan Entrepreneurship*,
10(2), 164.

Helena, M., Netha, S., Elerina, M., & Tunti,
D. (n.d.). Penerapan Prinsip-Prinsip
Good Governance Dalam
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di
Desa Penfui Timur Kecamatan
Kupang Tengah Kabupaten Kupang
(Vol. 9, Issue 2).

Karlina, K. (2020, July 23). *Good
Governance* Evaluation in School
Operational Funding (BOS).

Pendidikan, Jurnal, Budaya, & Pendidikan,
W., Nurman Effendi, A., Suswati, E.,
& Muawanah, U. (n.d.). 4-Analisis
Good Governance Bantuan
Operasional Perguruan Tinggi Negeri
(BOPTN) di Universitas Negeri
Malang (UM).

Perwujudan, A., Akuntabilitas, M., Dan, P.,
Perilaku, M., Di, O., Lingkungan, D.,
& Daerah, P. (n.d.). Analisis
Perwujudan *Good Governance*
Melalui Akuntabilitas Publik Dan.
2(1).

Rahayu, S., Jumaili, S., Jambi, U., Jambi-
MaBulian, L., Jambi, M., Studi
Akuntansi, P., & Ekonomi dan Bisnis,
F. (2020). Inventarisasi Dan Penilaian
Aset Sekolah Dalam Rangka
Mewujudkan *Good School
Governance*. *JITDM*, 2(1).

**Bustanul Ulum,
Dini ayu Pramitasari,
Anisaul Hasanah**

- Ramadana, A. (2021). Efektivitas Pasal 34 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Terhadap Pemanfaatan Anggaran Dana Partai Politik Prespektif *Good Governance* Dan Masalah Mursalah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3, 1–18.
- Seminar, P., Penelitian, N., & Pengabdian, D. (2021). Penelitian dan Pengabdian Inovatif pada Masa Pandemi Covid-19.
- Sony Erstiawan, M. (n.d.). *Good Corporate Governance* Penyelenggara Pendidikan Dalam Perspektif Agency Theory. 26(1), 2021.
- Sumatera Selatan, P. (n.d.). Penerapan *Good Governance* Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pemerintahan Daerah. 4(1), 2021.
- Volume, J., Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sindanghaji Tahun, S., Nurmala Dewi, A., Gunawan, W., & Sutisna, J. (2021). Penerapan Prinsip *Good Governance* di desa Sindanghaji kecamatan Palasah kabupaten Majalengka.
- Wendelinus Dasor Prodi PGSD STKIP St Paulus, Y., & Jend Ahmad Yani, J. (n.d.). IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH.
- Fauziyyah NA, Mulyani H, Purnamasari I. Analisis Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di
- ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DILIHAT DALAM PERSPEKTIF PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2021*
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kota Bandung. *J Pendidik Akunt Keuang*. 2018;6(1):21.
- Sjioen AE, Ludji SR. Analisis Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos). *J Inspirasi Ekon*. 2016;2(3):1-120.
- Larasati PA, Handayani N. Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Paud Di KB Negeri Pelangi. *J Ilmu-dan-Ris-Akunt*. 2021;10(7):1-16.
- Marpaung Y, Rotinsulu DC, Rorong IPF. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol.21 No.2 (2020). *J Pembangunan Ekon dan Keuang Drh*. 2020;21(2):76-93.
- Indrawati NK, Si M. DAN PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI PADA PT . ANSAR TERANG CRUSHINDO Oleh : Annisa Shabrina Dosen Pembimbing : *Real sector investment require substantial capital and need a relatively long time to develop . One of the real sector investment is mining sector w*.
- Jurnal J, Mea I, Alokasi P, Nagari D, Di ADN. ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* PADA JIMEA | *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. 2022;6(2):408-422.

**Bustanul Ulum,
Dini ayu Pramitasari,
Anisaul Hasanah**

Nurlida IN, Ghalib S. Analisis Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Umkm Di Kota Banjarmasin. *Smart Bus J.* 2022;1(2):36.

Qomariyah L, Sulistyowati E. Analisis Implementasi *Good Governance* Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi pada Yayasan YPI Darussalam Cerme). *J-Akunt-Kompetitif.* 2022;5(1):16-21.

Pelayanan M, Yang P, Di B, Ganesha PP. KECAMATAN CIATER KABUPATEN SUBANG. 2022;IX:289-299.

Mudhofar M. Analisis Implementasi *Good Governance* Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *J Ris Akunt dan Keuang.* 2022;10(1):21-30.

Haryadi RN, Handayani N. Analisis peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance*. *J-Ilmu-dan-Ris-Akunt.* 2021;10(1):1-14.

Pamungkas TK, Rosyanfikri R. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance*-dalam-Pelaksanaan-Pemerintahan-Desa. *JParadigMadani.* 2021;8(2):36-45.

Dr.farida Nugrahani, M. H. (2014). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). In Badan

ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DILIHAT DALAM PERSPEKTIF PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2021

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (pp. 1–44).

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2017). Undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020. *Law, 18(2), 4–6.*

Pendidikan, M., Kebudayaan, D. A. N., & Indonesia, R. (2013). Menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia. 2013–2015.

Peraturan Menteri Keuangan RI.(2021). Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 53(9), 1689–1699.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tentang Standar Nasional

**Bustanul Ulum,
Dini ayu Pramitasari,
Anisaul Hasanah**

*ANALISIS PENERAPAN GOOD
GOVERNANCE DILIHAT DALAM
PERSPEKTIF PERMENDIKBUD NOMOR 6
TAHUN 2021*

Pendidikan. Standar Nasional
Pendidikan, 102501, 1–49.

Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan. (2020). Pedoman
Pengadaan Barang atau Jasa di
Instansi Pendidikan.

Sutisna, A. (2021). Permendikbud 6 Tahun
2021 Tentang Juknis Pengelolaan
Dana Bos Reguler. *Journal of
Chemical Information and Modeling*,
43(1), 7728.

UU APBN. (2020). Undang undang nomor 9
tahun 2020 tentang APBN tahun
anggaran 2021. 051659.

ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DILIHAT DALAM PERSPEKTIF PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 20

ORIGINALITY REPORT

18% SIMILARITY INDEX	17% INTERNET SOURCES	7% PUBLICATIONS	1% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	journal.stienugresik.ac.id Internet Source	5%
2	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	<1%
3	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
4	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
5	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1%
6	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	<1%
7	Submitted to IAIN Pontianak Student Paper	<1%
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
9	journal.upgris.ac.id Internet Source	<1%
10	repository.stiedewantara.ac.id Internet Source	<1%
11	e-journal.trisakti.ac.id Internet Source	<1%

12

Taufik Nurrochman, Farid Muhammad,
Harsono Harsono, Suyatmini Suyatmini.
"Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri",
Munaddhomah: Jurnal Manajemen
Pendidikan Islam, 2023

Publication

<1 %

13

anggaradana.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On